

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak berperan penting dalam perkembangan suatu negara karena memiliki fungsi utama sebagai anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Ada dua fungsi utama pajak yaitu berfungsi sebagai *budgeter*, pajak digunakan sebagai sumber pemasukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Mardiasmo, 2016). Selain itu pajak juga berfungsi sebagai regulasi, dalam bidang sosial ekonomi pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur serta melaksanakan kebijakan pemerintah¹.

Seperti dikutip dari Mardiasmo (2016), berdasarkan lembaga pemungutnya pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang kewenangan pemungutannya dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

Salah satu contoh pajak daerah yaitu pajak restoran. Salah satu pemerintah daerah yang melakukan pemungutan pajak restoran adalah pemerintah daerah Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal dengan keindahan alamnya. Potensi tersebut memicu pertumbuhan ekonomi daerah seperti dibukanya tempat-tempat pariwisata. Kemunculan berbagai tempat wisata tersebut mendorong berdirinya berbagai usaha lain termasuk tempat makan atau restoran. Oleh karena itu pajak restoran menjadi salah satu sumber penting dalam penerimaan pajak daerah di Kabupaten Semarang.

¹ Mardiasmo, *Perpajakan*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2016 hlm 4.

Berikut ini perkembangan jumlah wajib pajak restoran di Kabupaten Semarang dari Tahun 2015 sampai tahun 2019

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Restoran Kabupaten Semarang

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Restoran
2015	81
2016	82
2017	86
2018	76
2019	91

Sumber : BKUD, 2015-2019.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Semarang dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 terdaftar 81 wajib pajak restoran di Kabupaten Semarang dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2017. Pada Tahun 2017 terdapat penurunan jumlah wajib pajak restoran. Penurunan jumlah wajib pajak tersebut disebabkan penutupan beberapa restoran dan adanya perubahan tarif terhadap restoran yang menyebabkan restoran dengan nilai penjualan dibawah Rp 10.000.000 per bulan tidak lagi menjadi wajib pajak restoran karena tidak dikenakan pajak restoran. Sedangkan pada tahun 2019 terdapat peningkatan jumlah wajib pajak restoran yang cukup pesat.

Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 mengatur bahwa restoran yang memiliki nilai penjualan lebih dari Rp 5.000.000 sampai dengan Rp 15.000.000 per bulan maka dikenakan tarif pajak restoran sebesar 5%. Sedangkan restoran yang nilai penjualannya lebih dari Rp 15.000.000 per bulan akan dikenakan tarif sebesar 10%. Kemudian bagi restoran yang setiap bulan memiliki nilai penjualan tidak lebih dari Rp 5.000.000 maka tidak akan dipungut pajak restoran.

Kemudian pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Semarang mengganti ketentuan-ketentuan tersebut. Pemerintah Kabupaten Semarang menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 yang mengubah ketentuan sebelumnya menjadi restoran dengan nilai penjualan lebih dari Rp 10.000.000 per bulan dikenakan pajak restoran sebesar 10%. Sedangkan restoran yang nilai penjualannya kurang dari Rp 10.000.000 per bulan tidak dikenakan pajak.

Berdasarkan perubahan ketentuan mengenai pajak restoran tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh perubahan batasan nilai penjualan restoran setiap bulan dan tarif pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Semarang. Selain itu penulis juga akan melakukan pembahasan mengenai kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis menentukan judul penelitian **“Dampak Perubahan Tarif Pajak Restoran Sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2010 Menjadi Perda Nomor 13 Tahun 2017”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh perubahan tarif pajak restoran terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana tingkat ketercapaian penerimaan terhadap target pajak restoran di Kabupaten Semarang selama tahun 2015-2019?
3. Bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2015-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak restoran terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian penerimaan terhadap target pajak restoran di Kabupaten Semarang tahun 2015-2019.
3. Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2015-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
Menambah pengalaman serta mengasah dan menerapkan pengetahuan yang dipelajari selama kegiatan perkuliahan dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) khususnya dalam bidang perpajakan.
2. Bagi Pembaca
Memberikan informasi mengenai pengaruh perubahan tarif pajak restoran terhadap pajak restoran di Kabupaten Semarang.
3. Bagi Pemerintah
Membantu pemerintah dalam mengevaluasi sumber penerimaan pajak daerah khususnya pajak restoran.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran secara umum agar pembaca lebih mudah memahami isi Laporan Praktik Kerja Lapangan, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang dibahas dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi seluruh teori yang digunakan sebagai dasar pembahasan dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan.

BAB III : GAMBARAN UMUM DAN METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum BKUD Kabupaten Semarang, visi misi BKUD Kabupaten Semarang, struktur organisasi BKUD Kabupaten Semarang, dan metode penelitian yang digunakan dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan dari rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran hasil dari pembahasan dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan.

